



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2026 DI TENGAH TURBULENSI GLOBAL

Yiyis Aldi Mebra
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yiyis.mebra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari kondisi perekonomian global yang tidak menguntungkan. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan dari 3,3 persen pada tahun 2024 menjadi 3 persen pada tahun 2025 dan 2026. Kondisi ini berdampak langsung pada negara mitra dagang utama Indonesia. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan turun dari 2,8 persen menjadi 2,1 persen, bahkan bisa mencapai 1,8 persen. Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia juga mengalami perlambatan dari 5 persen menjadi 4,6 persen, sementara Eropa dan Jepang menghadapi situasi serupa.

Perlambatan ekonomi global ini memberikan dampak langsung terhadap kinerja ekspor Indonesia, yang merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan risiko perang dagang yang dapat mengganggu rantai pasokan global. Sebagai respons, Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor dan tidak hanya bergantung pada mitra dagang tradisional.

Dari sisi domestik, Indonesia menghadapi tantangan dalam mendorong investasi dan konsumsi dalam negeri. Meski konsumsi swasta tetap tumbuh positif, upaya tambahan diperlukan untuk meningkatkan daya tarik investasi, baik dalam negeri maupun asing. Implementasi program Asta Cita yang dicanangkan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan momentum pertumbuhan yang lebih kuat.

Kondisi pasar keuangan global juga memberikan tekanan tambahan. Defisit fiskal Amerika Serikat yang diperkirakan naik dari 6,4 persen menjadi 7 persen berpotensi meningkatkan *US Treasury Yield*, yang akan berdampak pada biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia. Meskipun The Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga dua kali dari 4 persen menjadi 3,5 persen, ketidakpastian global tetap tinggi dan dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.

BI memproyeksikan nilai tukar rupiah tahun 2026 berada pada rentang Rp16.000—Rp16.500 per dolar AS, dengan inflasi terjaga pada kisaran 1,5—3,5 persen. Untuk menjaga stabilitas ini, BI telah melakukan berbagai intervensi tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar *offshore*, termasuk di Hongkong, Eropa, dan Amerika Serikat. Cadangan devisa Indonesia yang mencapai US\$152,5 miliar dinilai cukup kuat untuk mendukung stabilitas nilai tukar.

Strategi yang diusung BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi lima langkah utama: *pertama*, memperluas ekspor ke berbagai negara di luar mitra dagang tradisional; *kedua*, mendorong investasi termasuk penanaman modal asing (PMA) melalui perbaikan iklim investasi; *ketiga*, memperbesar stimulus fiskal untuk mendorong permintaan domestik; *keempat*, mendorong digitalisasi ekonomi termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sistem pembayaran; dan *kelima*, menerapkan kebijakan moneter pro-pertumbuhan melalui penurunan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar.

Implementasi kebijakan reformasi struktural menjadi aspek krusial dalam mencapai proyeksi pertumbuhan yang optimis. Reformasi ini mencakup akselerasi hilirisasi pertambangan, pertanian, dan sumber daya alam lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kewirausahaan, serta investasi dalam riset dan inovasi menjadi fondasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memberikan dampak berganda yang signifikan terhadap konsumsi domestik.

Dari perspektif kebijakan moneter, BI telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan melakukan dua kali penurunan suku bunga pada Januari dan Mei 2025, serta membuka peluang penurunan lebih lanjut. Langkah ini diimbangi dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp130,6 triliun dan penambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp80 triliun untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas. Digitalisasi sistem pembayaran melalui pengembangan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) ke pasar internasional, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Arab Saudi, menunjukkan upaya strategis untuk memperkuat infrastruktur ekonomi digital yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Atensi DPR

Menghadapi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menantang, DPR RI melalui Komisi XI perlu mendorong sinergi kebijakan yang lebih kuat antara otoritas moneter dan fiskal. *Pertama*, diperlukan pembahasan mendalam mengenai implementasi program Asta Cita dan optimalisasi penggunaan anggaran yang telah ada untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, Komisi XI perlu mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui pengoptimalan program promosi perdagangan dan negosiasi perjanjian dagang strategis. *Ketiga*, pengawasan terhadap efektivitas stimulus fiskal dan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih perlu diintensifkan untuk memastikan tepat sasaran. *Keempat*, mendorong percepatan digitalisasi ekonomi melalui optimalisasi program-program digital yang sudah berjalan dan pengembangan UMKM. *Kelima*, melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan moneter terhadap sektor riil dan memastikan koordinasi yang optimal antara kebijakan fiskal dan moneter dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber

antaranews.com, 4 Juli 2025;
ekonomi.republika.co.id, 2 Juli 2025; dan
kumparan.com, 1 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Fauzan Lazuari R.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*